

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, *LEVERAGE* DAN
KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**

SKRIPSI

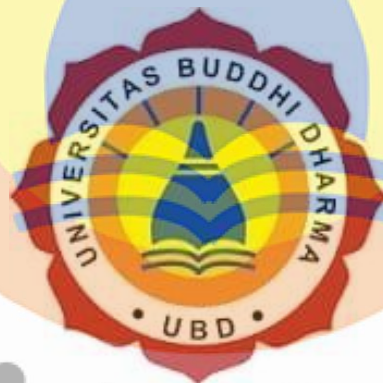
Oleh :

DEBBY CLAUDIA

20200100115

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, *LEVERAGE* DAN
KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

DEBBY CLAUDIA

20200100115

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Debby Claudia
NIM : 20200100115
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Usulan Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 05 Oktober 2023

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,


Jenni, S.E., M.Akt.

NIDN : 0411097402


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN : 0401016810



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Debby Claudia

NIM : 20200100115

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Menyetujui,

Pembimbing,


Jenni, S.E., M.Akt.
NIDN : 0411097402

Tangerang, 11 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jenni, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Debby Claudia

NIM : 20200100115

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Telah layak untuk mengikuti sidang Skripsi.

Tangerang, 11 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing,

Jenni, S.E., M.Akt.

NIDN : 0411097402

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Debby Claudia
NIM : 20200100115
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Sabtu, tanggal 24 Febuari 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Subendra, S.E., M.M.
NIDN : 0401077202

Penguji I : Dr. David Kiki Baringin, S.E., M.M., CMA.
NIDN : 0401026903

Penguji II : Diana Silaswara, S.E., M.M.
NIDN : 0426017501

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100115
Nama : Debby Claudia
Jenjang Studi : Strata I
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen, Leverage dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Industrial Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022)”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 11 Januari 2024

Penulis



Debby Claudia

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan atau kebohongan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Rektor Universitas Buddhi Dharma yang telah dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Debby Claudia

NIM : 20200100115

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*, *leverage* terhadap *tax avoidance*, komite audit terhadap *tax avoidance*, serta pengaruh secara simultan komisaris independen, *leverage*, komite audit terhadap *tax avoidance*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor *industrial goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang didapatkan sebanyak 80 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 25

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta komisaris independen, *leverage*, komite audit, secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : ***Tax Avoidance, Komisaris Independen, Leverage, Komite Audit.***

THE EFFECTS OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, LEVERAGE, AND AUDIT COMMITTEE ON TAX AVOIDANCE

**(Empirical Study of Industrial Goods sub-sector Companies Listed on the
Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022)**

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of independent commissioners on tax avoidance, leverage on tax avoidance, audit committees on tax avoidance, as well as the simultaneous influence of independent commissioners, leverage, audit committees on tax avoidance.

The sample used in this research is industrial goods subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. Determining the sample in this research used the purposive sampling method. The samples obtained were 80 companies. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression and processed using the SPSS version 25 program

The results of this research show that the independent commissioner variable has no effect on tax avoidance, leverage has no effect on tax avoidance, the audit committee has an effect on tax avoidance, and independent commissioners, leverage, audit committees simultaneously have an effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Independent Commissioner, Leverage, Audit Committee.

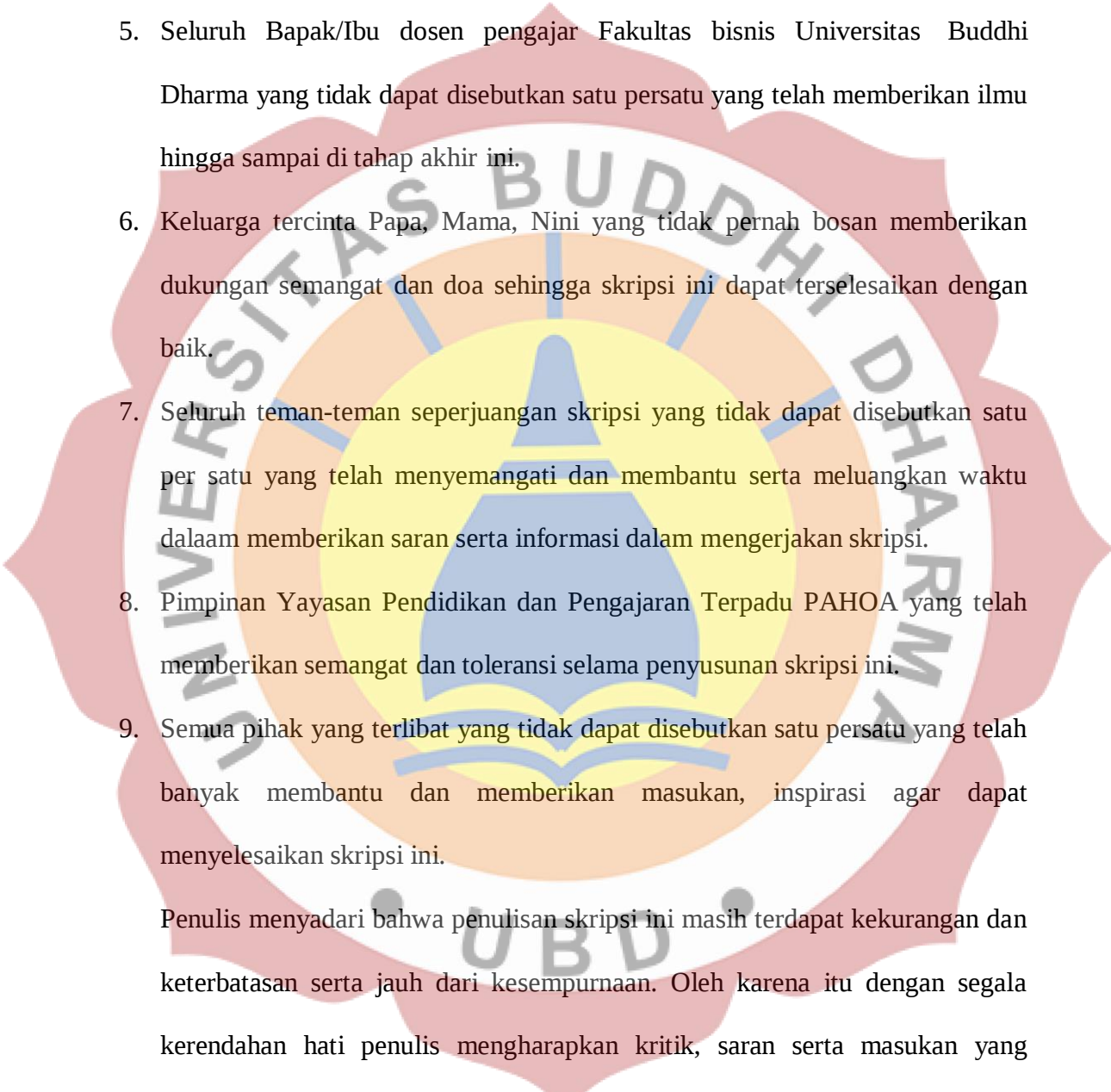
KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada TuhanYang Maha Esa karena dengan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat waktu. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program S1 jurusan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan pada Universitas Buddhi Dharma.

Penelitian skripsi ini berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* Pada Tahun 2018-2022)”**.

Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dukungan , bimbingan serta doa dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan penulis ingin sampaikan idengan tulus hati serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggreani, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.Selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

- 
4. Ibu Jenni, S.E., M.Akt.selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengetahuan, kritik, saran serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
 5. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas bisnis Universitas Buddhi Dharma yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu hingga sampai di tahap akhir ini.
 6. Keluarga tercinta Papa, Mama, Nini yang tidak pernah bosan memberikan dukungan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 7. Seluruh teman-teman seperjuangan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah menyemangati dan membantu serta meluangkan waktu dalam memberikan saran serta informasi dalam mengerjakan skripsi.
 8. Pimpinan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Terpadu PAHOA yang telah memberikan semangat dan toleransi selama penyusunan skripsi ini.
 9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan masukan, inspirasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tangerang, 11 Januari 2024

Penulis

Debby Claudia



DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Gambaran Umum Teori.....	15
1. Teori Perilaku yang Direncanakan (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	15
2. Pengertian Pajak.....	16
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
4. Fungsi Pajak.....	18
5. Komisaris Independen.....	19
6. <i>Leverage</i>	20
7. Komite Audit.....	21
8. Tax Avoidance	23
B. Hasil Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pemikiran	35
D. Perumusan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Objek Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Populasi dan Sample	43
1. Populasi	43
2. Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44

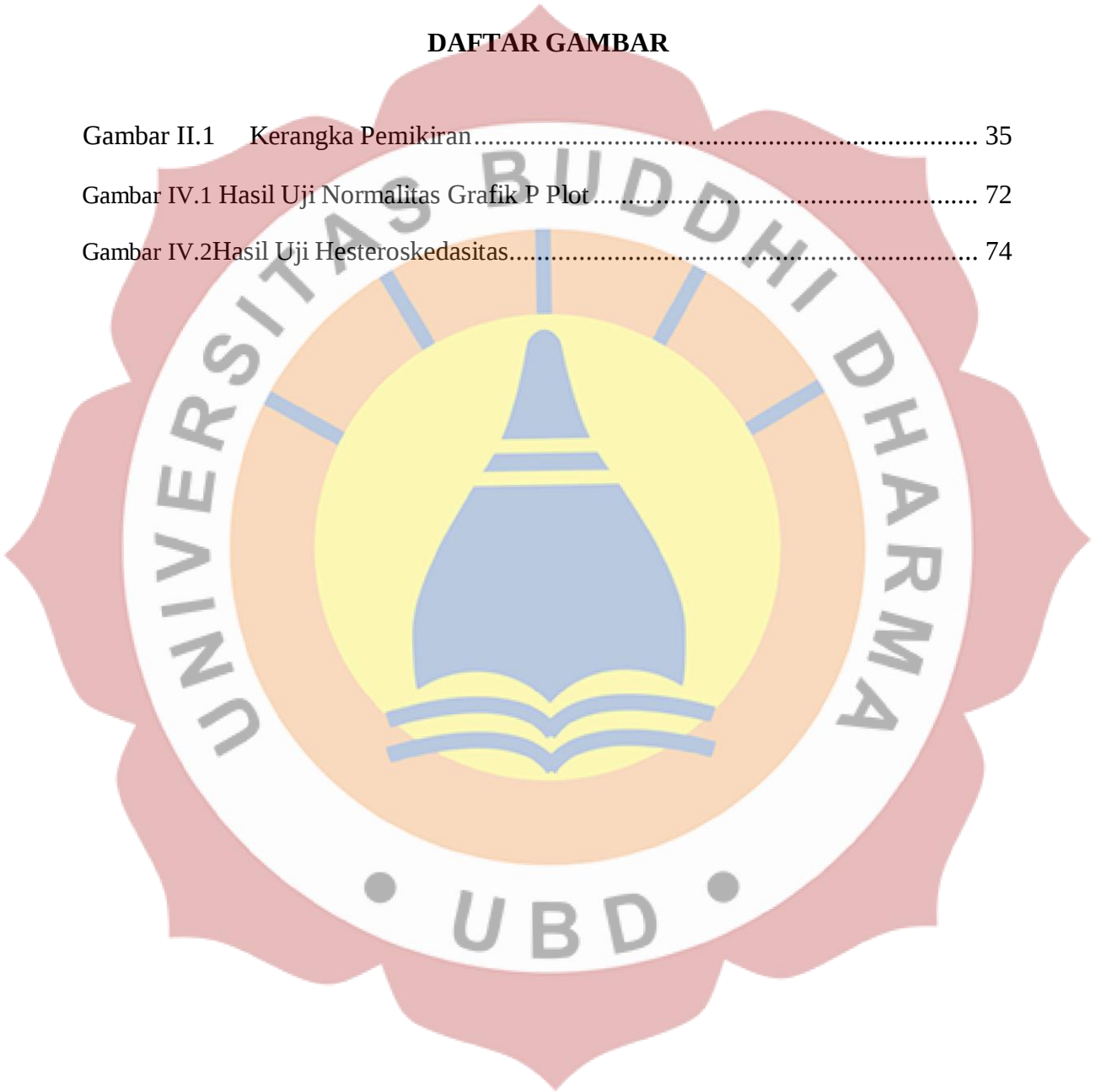
F.Operasionalisasi Variabel Penelitian	44
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	55
1. Komisariss Independen.....	57
2. <i>Leverage</i>	60
3. Komite Audit	63
4. <i>Tax Avoidance</i>	64
A. Analisis Hasil Penelitian.....	67
B. Pengujian Statistik.....	76
C. Pengujian Hipotesis.....	80
D. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

NO	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel II.1	Hasil Penelitian Tedahulu.....	25
Tabel III.1	Jenis Penggolongan Penelitian.....	41
Tabel IV.1	Prosedur Pemilihan Sampel.....	55
Tabel IV.2	Daftar Perusahaan Sampel.....	56
Tabel IV.3	Tabel Perhitungan Komisaris Independen	57
Tabel IV.4	Tabel Perhitungan <i>Leverage</i>	60
Tabel IV.5	Tabel Perhitungan Komite Audit	63
Tabel IV.6	Tabel Perhitungan <i>Tax Avoidance</i>	64
Tabel IV.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif	68
Tabel IV.8	Hasil Uji Normalitas <i>Komogrov-smirnov</i>	71
Tabel IV.9	Hasil Uji Multikolineritas.....	73
Tabel IV.10	Hasil Uji Autokorelasi.....	76
Tabel IV.11	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	77
Tabel IV.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	79
Tabel IV.13	Hasil uji parsial (uji statistik t) Komisaris Indpenden	80
Tabel IV.14	Hasil uji parsial (uji statistik t) <i>Leverage</i>	81
Tabel IV.15	Hasil uji parsial (uji statistik t) Komite Audit	82
Tabel IV.16	Hasil uji simultan (uji statistik F)	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas Grafik P Plot.....	72
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Nama dan Kode Perusahaan
Lampiran 2	Hasil Perhitungan Komisaris Independen
Lampiran 3	Hasil perhitungan <i>Leverage</i>
Lampiran 4	Hasil Perhitungan Komite Audit
Lampiran 5	Hasil Perhitungan <i>Tax Avoidance</i>
Lampiran 6	Hasil Perhitungan Variabel X dan YS
Lampiran 7	Hasil Output SPSS
Laporan Keuangan	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak di Indonesia menyumbang proporsi yang tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Di Indonesia terdapat banyak subjek pajak yang berlomba-lomba untuk melaksanakan pengurangan pajak karena menganggap melalui penyetoran pajak bisa memotong *profit*, sehingga jumlah pajak yang terutang akan sesuai dengan total pendapatan yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Sebagai wajib pajak badan, disatu sisi kita menganggap pajak sebagai beban tetapi untuk pemerintah, pajak merupakan sumber penghasilan. Hal tersebut umumnya dialami sebab terdapat kepentingan yang berbeda diantara fiskus dan subjek pajak. Pemerintah tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebab sebuah kepentingan dasar subjek pajak atau pebisnis adalah mengoptimalkan kemakmuran investor atau pemilik modal. Usaha yang dilaksanakan oleh pebisnis yakni melalui minimalisasi beban pajak melalui cara taat dengan kebijakan undang-undang, dikarenakan pajak adalah contoh aspek utama yang bisa mengurangi keuntungan. Jumlah pajak dipengaruhi oleh besaran pendapatan. Besarnya pendapatan membuat pajak

terhutang makin tinggi.

Penyakit menular baru yang disebabkan dari *Corona Virus Disease* atau disebut sebagai Covid-19 telah menyerang Indonesia dan dunia selama lebih dari 2 tahun. Kemunculan pandemi covid tersebut menyebabkan permasalahan finansial serta kesehatan. Dampak pandemic covid-19 atas ekonomi di tanah air amat terasa. Di Q2 2020, berdasarkan keterangan Kemenkeu tanggal 3 Desember 2020 yang menjelaskan bahwasanya telah terdapat 451.026 lebih instansi yang sudah memberikan pengajuan insentif perpajakan serta sudah diterima sejumlah 214.097 yang mencakup industri perdagangan sejumlah 100.478, industri manufaktur sejumlah 41.137, industri pembangunan serta perumahan sejumlah 14.855 serta industri jasa sejumlah 13.625 (Putri, 2020). Keberadaan insentif pajak yang diterbitkan pemerintah nyatanya menimbulkan penyalahgunaan oleh instansi dalam menyusun rancangan perpajakan melalui pelaksanaan usaha untuk menghindari pajak sepanjang pandemi Covid-19.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah pada artikel yang diberi judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang dilakukan pelaporan *Tax Justice News* bahwasanya senilai Rp 68,7 triliun, kerugian itu ditimbulkan dari wajib pajak instansi yang melaksanakan *tax avoidance* di tanah air. Jumlah kehilangan yang ditimbulkan menyentuh Rp 67,6 triliun atau US\$ 4,78 miliar. Sementara sisanya bersumber dari

subjek pajak perorangan dengan total menyentuh Rp 1,1 triliun atau US\$ 78,83 juta. Tidak hanya itu, *multinational company* melaksanakan peralihan keuntungan ke kas negara yang dianggap merupakan utopia pajak. Hal ini dilaksanakan untuk tidak memberikan laporan laba atau profit yang sesungguhnya didapatkan agar dengan begitu sebuah instansi bisnis yang melaksanakan praktik itu bisa melakukan pembayaran pajak lebih rendah dari pada ketentuan. Kementerian keuangan menetapkan secara gamblang target perolehan pajak tahun 2020 mencapai Rp. 1.198,82 triliun. Maka dari itu, perkiraan penghindaran pajak kurang lebih 5.7% dibandingkan target akhir 2020. Di *tax avoidance* terkait, kurang lebih diperkirakan 5.16% jika dikomparasi dengan realisasi perolehan perpajakan 2019 dengan total Rp. 1.332 triliun. Adapun total penghindaran perpajakan yang dilaksanakan subjek pajak instansi maupun personal menyentuh 1.09 jt gaji petugas kesehatan, jika dibandingkan terhadap stimulus medis melalui program pemulihan perekonomian nasional (PEN) maka sejumlah Rp. 68,7 triliun *tax avoidance* sanggup membayarkan 70.5% dari total kesehatan, dengan total Rp. 97.26 triliun. Berdasarkan jurnal *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* dijelaskan bahwasanya status Indonesia dalam kasus *tax avoidance* yang dilaksanakan subjek pajak instansi maupun personal berada di ranking ke-4 untuk seluruh Asia sesudah China, India, Jepang. (<https://www.pajakku.com>, 2020). Namum pada fenomena yang kedua berasal dari studi *Tax Justice Network* (TJN), lembaga mandiri yang

berdomisili di Inggris, melakukan pencatatan tindakan *tax avoidance* sudah menyebabkan kerugian dunia hingga US\$ 427 miliar per tahun/ kurang lebih Rp. 6.046 triliun (asumsi kurs Rp. 14. 160 per dollar AS). Pada suatu penjabaran TJN menjelaskan mereka sudah melakukan penyaringan data secara global serta memaksa pihak berkepentingan untuk bertindak terhadap suaka pajak bayangan yang sudah dipindah alih miliaran dollar dari negara-negara yang memerangi covid-19. Pada aspek tersebut, TJN melakukan pengecekan deklarasi serta nilai multinasional yang diperoleh oleh instansi agar bekerja bersama di bidang perekonomian serta pembangunan (OECD). Mereka juga melaksanakan pengkajian atas informasi personal tahun 2018 dari *Bank of International Settlements*, “negara-negara yang kehilangan lebih dari US\$ 427 miliar pajak setiap tahun akibat penyelewengan pajak global serta *tax avoidance* swasta terang TJN pada jurnalnya, dikutip dari AFP, (Jum’at, 20/11) , TJN turut mengestimasi bahwasanya total *tax avoidance* pajak mencakup US\$245 miliar yang dilaksanakan dari bisnis serta US\$ 182 miliar dilaksanakan perorangan. (<https://www.cnnindonesia.com>, 2020).

Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2020 ini covid19 masuk di indonesia yang membuat sehingga banyak terjadi PHK karena pada instansi terjadi penurunan profit sehingga menyebabkan instansi terkait tidak mampu melunasi tanggung jawabnya terhadap pegawai yakni berwujud upah.

Kenyataannya, masyarakat Indonesia sendiri masih sangat minim tentang pengetahuan pajak masyarakat masih belum tahu tentang manfaat dalam melaksanakan wajib pajak yang dimana guna menstabilkan ekonomi yang terdapat pada tanah air, perpajakan juga mampu meningkatkan peluang kerja sebab pajak bisa dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan wilayah termasuk medis, sarana prasarana, serta edukasi. Disamping itu terdapat juga penduduk yang memahami pentingnya perpajakan namun tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, karena beranggapan melalui keberadaan perpajakan, bisa meminimalisir hasil yang sudah diraih individu terkait, selanjutnya disebabkan oleh keberadaan segelintir individu yang menyalahgunakan perpajakan bukan demi kepentingan sebuah wilayah, tetapi dimanfaatkan demi keperluan personal yang menyebabkan penduduk mempunyai ketidakpedulian untuk menyetor pajak. Apabila penduduk tidak melakukan tanggung jawab perpajakannya maka bisa dijatuhi hukuman/sanksi.

Sanksi yang bisa diberikan berwujud denda administratif sampai kurungan penjara. Denda administratif sendiri mencakup hukuman yang berwujud denda, bunga, maupun kenaikan, sementara di sanksi pidana itu sendiri mencakup 3 hukuman yakni penjara, pidana, serta denda. Hukuman-hukuman itu dibuat supaya penduduk taat dengan tanggung jawab sebagai penduduk Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara yang mengharuskan perpajakan atas individu personal hingga instansi. Oleh karena

keberadaan sanksi itu menyebabkan banyak instansi memilih *tax avoidance* yang tidak melawan hukum.

Komisaris Independen adalah anggota parlemen yang tak terafiliasi dengan direksi, anggota komisaris lain yang merupakan investor yang lain. Eksistensi komisaris independen pada instansi bisa mengoptimalkan performa kerja pihak pengelola yang mana persentase komisaris independen yang makin besar mampu memperketat kontrol pihak pengelola sehingga perbuatan *tax avoidance* bisa diminimalisasi. Menurut (Solekhah, 2020) mengatakan bahwa komisaris independen adalah:

“Dewan komisaris yang memiliki hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas di perusahaan yang sedang diawasi dan dikelola”.

Dalam menjalankan operasi perusahaan tentu mempunyai bermacam persoalan khususnya yang berhubungan dengan keuangan supaya instansi itu bisa beroperasi dan berlangsung seperti seharusnya. Uang senantiasa diperlukan dalam meng-cover sebagian atau seluruh dari dana yang dibutuhkan termasuk dana jangka panjang ataupun dana jangka pendek dana turut diperlukan guna memperluas bisnis yang dimana instansi wajib senantiasa sedia uang pada jumlah tertentu agar bisa dipakai jika diperlukan.

Leverage adalah biaya tetap yang timbul akibat struktur modal atau struktur keuangan perusahaan, *leverage* dapat terjadi dalam perusahaan yang operasinya menggunakan aktiva atau dana yang dapat menimbulkan beban.

Sedangkan keberadaan dari komite audit pada sebuah instansi memiliki fungsi guna mendukung dewan komisaris melalui bentuk pengawasan, yaitu ketika mengamati pihak pengelola pada penyusunan pelaporan finansial instansi. Tugas dari komite audit dalam menelaah laporan keuangan, memantau aktivitas pelaksanaan manajemen resiko dan pengendalian internal oleh direksi mengidentifikasi benturan kepentingan, dan lain-lain yang efeknya secara langsung dapat meminimalisir adanya praktik *tax avoidance* yang nantinya akan memberikan suatu citra buruk dari masyarakat terhadap perusahaan.

Menurut (Pohan, 2018) mengatakan bahwa *tax avoidance* atau penghindaran pajak diartikan menjadi sebuah usaha untuk menghindari perpajakan yang dilaksanakan sejalan dengan hukum serta aman untuk subjek pajak dengan tidak menentang kebijakan pajak yang diberlakukan yang mana teknik serta metode yang digunakan biasanya menggunakan kelemahan yang ada pada perundang-undangan maupun kebijakan pajak itu sendiri. Berbagai instansi melaksanakan *tax avoidance* walaupun pajak tersebut mempunyai sifat wajib namun banyak subjek pajak individu maupun instansi yang berupaya melakukan penghindaran.

Berkaitan dengan fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak, didalam penelitian yang dilakukan oleh (Mappadang, 2021) menjelaskan bahwasanya komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara temuan penulis (Mappadang, 2021) dan (Wiratmoko, 2018) menjelaskan bahwasanya komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dimana pada studi yang lain juga dijelaskan bahwasanya tidak terjadi pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen (Fitri, 2019).

Menurut (Fauzan, 2019) menyatakan bahwasanya *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dimana hal tersebut berarti apabila instansi memakai pinjaman pada pengelolaan biaya, maka beban bunga wajib dibayar agar pemakaian utang instansi digunakan untuk pajak penghasilan dengan memperoleh dari penghasilan kena pajak. Lain halnya dengan studi yang diadakan (Widyaningsih, 2018) mengatakan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yaitu dimana makin tinggi biaya bunga akan menyebabkan beban perusahaan mengurangi pajak perusahaan dan instansi akan melakukan pembayaran pajak dalam nilai terbatas. Sementara studi yang diadakan oleh (Tebiono, 2019) menjelaskan bahwasanya *Leverage* tidak berpengaruh atas *tax avoidance*, artinya bahwa bunga yang mengakibatkan utang hasil jangka panjang perusahaan rendah sehingga beban bunga tidak dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Menurut (Fauzan, 2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif atas *tax avoidance*. Hal tersebut selaras dengan studi yang diadakan oleh (Pitaloka, 2019). Hal ini terjadi karena keterlibatan anggota komite audit memberi kepastian untuk bisa melaksanakan intervensi untuk menentukan ketetapan tarif pajak efektif dari suatu instansi, indikasi tersebut menandakan instansi yang melibatkan komite audit akan mempunyai tanggung jawab serta keterbukaan lebih atas pelaporan finansial yang diberikan ke publik. (Prakosa & Hudiwinarsih, 2019) menyatakan bahwasanya komite audit memberikan pengaruh positif atas *tax avoidance*. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa komite audit memberikan pengaruh atas kebijakan instansi dalam melaksanakan *tax avoidance*. Peran komite dapat menghasilkan kontrol yang lebih baik akan kegiatan perusahaan. Studi yang diadakan oleh (Honggoh, 2019) menjelaskan komite audit tidak berpengaruh atas *tax avoidance* hal tersebut selaras dengan studi (Yohan, 2019) yang mengatakan jika kerja komite audit kurang memuaskan dan tidak mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan, yang menunjukkan kurangnya upaya perusahaan untuk menghindari pajak, meskipun komite audit memenuhi standar BEI.

Menurut penjelasan latar belakang tersebut maka peneliti memutuskan untuk melaksanakan studi yang diberi judul **“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX**

AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Industrial Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022)”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan terdahulu, maka bisa dilakukan identifikasi permasalahan menjadi :

1. Rendahnya tingkat transparansi perusahaan sehingga dapat menimbulkan upaya *tax avoidance*
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kepatuhan terhadap perpajakan di Indonesia sehingga dapat terjadi penghindaran pajak.
3. Adanya sanksi diberikan agar dapat mentaati kewajibannya dalam membayar pajak.
4. Keberadaan komisar independen dan komite audit dapat mencegah tindakan penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran dari latar belakang yang sudah dijelaskan terdahulu. Penelitian ini bertujuan guna melakukan pengujian antara relasi Komisaris Independen, *leverage* dan Komite Audit dengan *Tax avoidance*. Maka perumusan permasalahan pada studi ini dijabarkan menjadi:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Komisaris Independen, *Leverage*, Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, studi ini mempunyai tujuan yang dijabarkan menjadi:

- 1) Meneliti dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*
- 2) Meneliti dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
- 3) Meneliti dan menganalisis pengaruh Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
- 4) Meneliti dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen, *leverage*, Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk Akademis

Bisa memperkaya pengetahuan terkait adanya pengaruh *tax avoidance* secara resmi serta bisa dijadikan materi referensi untuk pihak-pihak yang hendak melaksanakan riset lanjutan mengenai penghindaran pajak

b. Untuk diri sendiri

Studi ini bisa memperkaya pengetahuan selain pengalaman yang berhubungan dengan komisaris independen, *leverage*, selain komite audit yang berhubungan dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak

2. Manfaat praktis

a. Untuk Investor

Hasil studi ini bisa digunakan penanam modal menjadi bahan pertimbangan ketika melaksanakan suatu penanaman modal di instansi sub sektor *industrial goods*.

b. Untuk Perusahaan

Bisa dibuat jadi masukan maupun saran dan bahan untuk dipertimbangkan ketika mengambil kebijakan praktek *tax avoidance* perpajakan instansi

F. Sistematika Penulisan

Studi ini dikelompokkan ke dalam bab yang terstruktur yang mana tiap bab memiliki maksud yang berbeda. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca mudah mengerti isi dari studi ini. Sistematika penulisan yang dimanfaatkan pada studi ini dijabarkan menjadi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas dasar konsep yang berkaitan serta bisa dijadikan dasar kerangka teori. Di bab ini akan dibuat penjabaran tentang konsep *tax avoidance*, konsep komisaris independen, konsep *leverage*, konsep komite audit, hasil studi terdahulu, rangka pemikiran, serta merumuskan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga menjabarkan tentang metode pengamatan yang dimanfaatkan, yang mencakup tipe penelitian, objek pengamatan, populasi serta sampel, metode perolehan informasi, operasional variabel pengamatan dan metode analisis informasi yang dimanfaatkan pada studi.

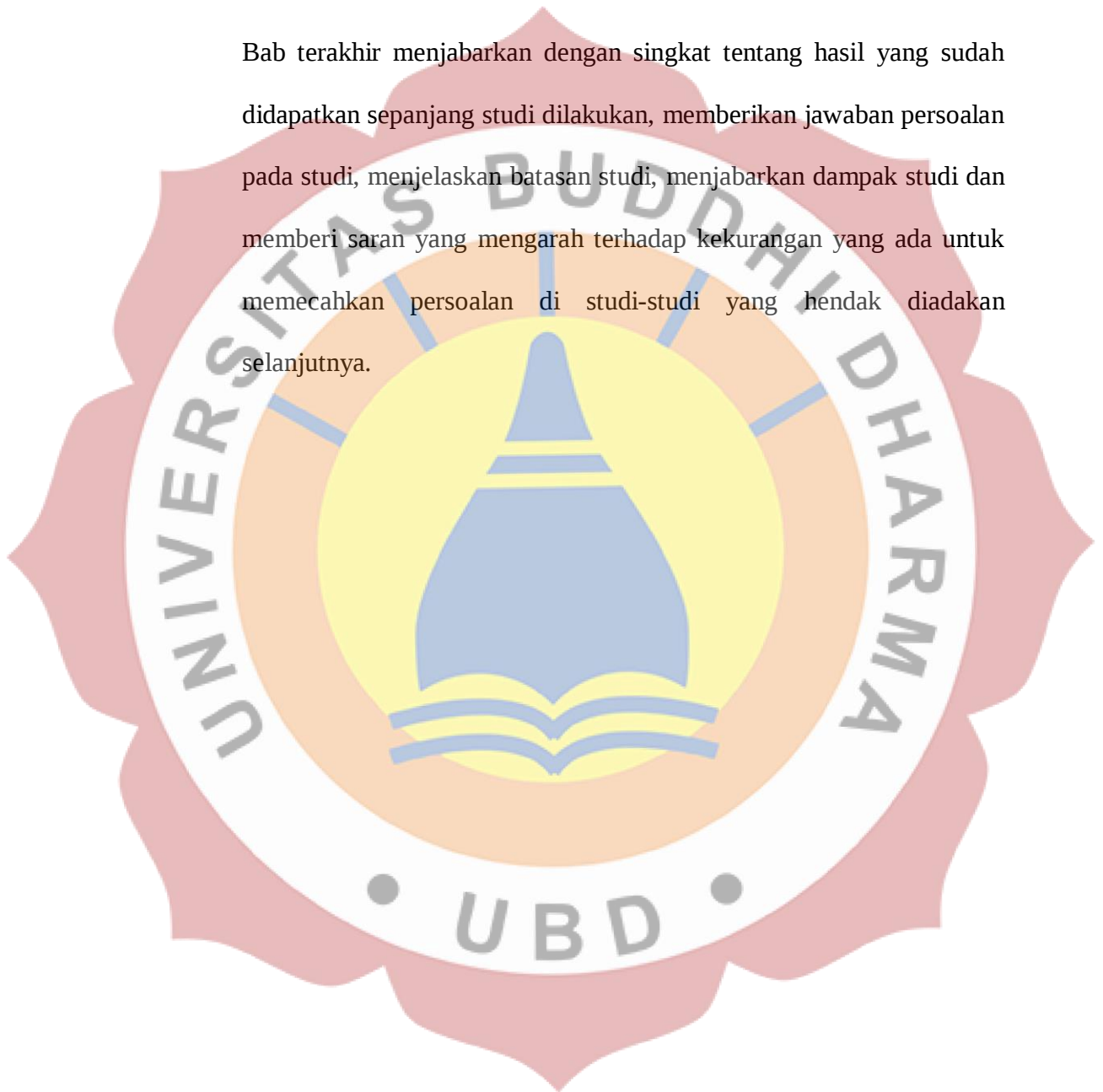
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab tersebut menjabarkan mengenai data temuan studi, analisa hasil pengamatan, uji hipotesis, serta penjelasan tentang dampak komisaris independen, *leverage*, serta komite audit terhadap *tax avoidance*

(studi empiris terhadap perusahaan sub sektor *industrial goods* yang terdaftar pada bursa efek indonesia 2018-2022)

BAB V PENUTUP

Bab terakhir menjabarkan dengan singkat tentang hasil yang sudah didapatkan sepanjang studi dilakukan, memberikan jawaban persoalan pada studi, menjelaskan batasan studi, menjabarkan dampak studi dan memberi saran yang mengarah terhadap kekurangan yang ada untuk memecahkan persoalan di studi-studi yang hendak diadakan selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen dalam teori ini menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dan menjelaskan hubungan antara keyakinan, sikap dan norma. Wajib pajak patuh jika dilihat dari sudut pandang psikologis. Model TPB berpendapat bahwa adanya niat (*intention*) dapat mempengaruhi patuh atau tidaknya seseorang terhadap aturan perpajakan. Kesan yang terbentuk pada suasana hati seseorang dapat mempengaruhi keyakinannya sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dicapai ini dapat berdampak pada patuh atau tidaknya individu tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak bagi penyelenggaraan negara, tentu saja akan menunaikan kewajiban perpajakannya atau biasa disebut dengan *behavioral belief*. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak tersebut menginginkan adanya timbal balik dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang akan memotivasi

untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan.

1. Pengertian Pajak

Menurut Widnyana (2018) mengatakan :

Pajak merupakan setoran untuk negara yang bisa dipaksa dimana terhutang harus melakukan pembayaran menurut ketentuan/kebijakan, dengan tidak memperoleh imbal balik, yang bisa ditunjuk langsung serta berguna untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

(Syarifudin, 2018, p. 12) berpendapat bahwa:

Pajak merupakan contoh sumber penghasilan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut berbagai pengertian pajak tersebut, bisa diambil simpulan bahwasanya pajak merupakan pembayaran wajib untuk negara yang dimanfaatkan dalam mendanai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Syarifudin (2018) mengatakan bahwa ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assessment System*

Merupakan metode pemungutan pajak yang memberikan kewenangan untuk fiskus/pemerintahan dalam menetapkan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak (wp).

2. *Self assesment system*

Mekanisme pengumpulan pajak yang memberikan tanggung jawab terhadap wajib pajak (wp) dalam menetapkan dengan mandiri besaran pajak terutang. Maka dari itu, subjek pajak diberikan tanggung jawab penghitungan mandiri pajak terutang, membayar mandiri, dan melaporkan sendiri dan mempertanggung jawabkan pajak terutang

3. *Withholding System*

Yaitu mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kewenangan untuk pihak ketiga (bukan merupakan fiskus serta subjek pajak yang berkaitan) guna menetapkan besaran pajak terutang oleh subjek pajak. Menurut sistematika perpajakan ini, besaran pajak terutang ditetapkan oleh pihak ketiga. Subjek pajak bersifat pasif serta peranan instansi yang mengumpulkan perpajakan hanya untuk memantai rangkaian tindak control ataupun menegakkan hukum (pengecekan serta penyidikan perpajakan)

3. Fungsi Pajak

Widnyana (2018) mengatakan bahwa fungsi pajak sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran

Merupakan manfaat yang terdapat di disektor publik yakni manfaat yang melakukan pengumpulan uang pajak sebanyak mungkin seturut dengan perundang-undangan yang diberlakukan yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan dalam mendanai pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Adalah fungsi bahwasanya pajak terkait akan dimanfaatkan menjadi sebuah instrumen pencapaian target yang terletak di luar sektor finansial.

3. Fungsi Demokrasi

Adalah fungsi yang adalah contoh perwujudan dari sistematika gotong-royong meliputi aktivitas pemerintah serta pengembangan untuk keselamatan masyarakat yang seringkali dihubungkan dengan hak individu apabila memperoleh layanan dari pemerintahan.

4. Fungsi Distribusi

Adalah fungsi yang lebih mengutamakan ke aspek keadilan serta pemerataan di masyarakat.

5. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah kedudukan yang paling tinggi sesudah investor karena komisaris independen mempunyai peranan yang tergolong krusial pada instansi, memberi saran terhadap peraturan pengelolaan instansi yang disusun para petinggi, dimana tugas dari komisaris tersebut yakni mengatur aktivitas dewan komisaris. (Sunarto dkk, 2021) Apabila sebuah instansi mempunyai komisaris independen yang kompeten maka instansi terkait dapat memberikan performa kerja yang juga baik sebab ada keefektivan serta pengelolaan instansi yang ditetapkan dari mutu fungsi dewan komisaris (Mappadang, 2021). Apabila proporsi komisaris independen makin besar pada suatu instansi diekspektasikan akan menaikkan kontrol atas performa kerja pihak pengelola dan membuat mereka tidak menjalankan perpajakan.

Artinya dapat disimpulkan apabila instansi mempunyai komisaris independen maka tingkatan independensi makin bertambah dan membuat instansi, tidak dapat mengurangi tindakan praktik *tax avoidance*. Adapun pengukuran dalam menghitung komisaris independen yaitu:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Semua Anggota Dewan komisaris}}$$

6. *Leverage*

Guna melaksanakan operasi tiap instansi mempunyai bermacam keperluan khususnya yang berhubungan dengan finansial supaya instansi bisa beroperasi sebagai mana seharusnya. Pendanaan senantiasa diperlukan guna mencukupi semua maupun sebagian dana yang dibutuhkan, termasuk dana periode singkat maupun periode panjang.

Leverage adalah perbandingan yang dimanfaatkan dalam pengukuran tahapan aset instansi didanai melalui pinjaman. Hal tersebut berarti besaran beban pinjaman yang ditanggung instansi dari pada aktiva, pada pengertian luas dijelaskan bahwasanya perbandingan ini dimanfaatkan guna melakukan pengukuran kapabilitas instansi dalam melakukan pembayaran semua tanggung jawabnya, termasuk periode singkat ataupun panjang apabila perusahaan dibubarkan.

Leverage adalah perbandingan yang dimanfaatkan dalam pengukuran seberapa besar instansi didanai dengan hutang menurut (Dr. kasmir, 2018, p. 151) dalam buku Analisis Laporan Keuangan. Dapat disimpulkan *Leverage* merupakan pemanfaatan sumber pendanaan instansi, termasuk dalam periode panjang ataupun periode singkat.

Dan cara untuk mengukur *Leverage* ada 2 cara yaitu *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Asset}}$$

$$\text{DER} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Namun dapat disimpulkan bahwa pada studi ini memanfaatkan metode *Debt to asset* dalam menghitung dan mengukur *Leverage*.

7. Komite Audit

Menurut (Syofyan, 2021) dalam buku Good Corporate Governance (CGC) mengatakan bahwa:

komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dari perusahaan yang tugasnya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjaga independensi akuntan, pemeriksa internal terhadap tim manajemen sesuai dengan prinsip CGC.

Tujuan pembentukan komite audit yakni guna mendukung serta menjalankan fungsi serta tugas dewan komisaris untuk menjamin efektivitas sebuah sistematisa kontrol internal serta tata laksana tugas auditor dari luar maupun dari dalam. Komite audit melakukan tindakan secara mandiri untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab. Keanggotaan komite audit setidaknya mencakup 3 individu anggota komite yang bersumber dari komisaris indepenen serta eksternal sebuah instansi.

Menurut Dewi (2019) komite audit bisa dibentuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dapat bekerja secara profesional, komite audit berdampak atas jalannya perusahaan karena komite audit mempunyai peranan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah memenuhi kebijakan akuntansi yang berlaku. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham menyangkut laporan keuangan, diharapkan dengan total komite audit dapat meningkatkan kontrol untuk pihak pengelola. Adapun rumus yang dalam komite audit adalah :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Dapat disimpulkan bahwa pada studi ini menggunakan rumus dari total jumlah komite audit dalam perusahaan.

8. Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan sebuah skema *tax avoidance* dengan tujuan meminimalisir nilai pajak dengan menggunakan celah atau kebijakan perpajakan sebuah negara. Pada hakekatnya penghindaran pajak mempunyai sifat sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan pajak. Tetapi praktik tersebut dapat memberikan dampak untuk perolehan pajak suatu negara dimana seluruh pihak setuju bahwa penghindaran pajak adalah praktik yang tidak bisa diterima, Namun di sisi lain instansi pasti berupaya menekan penyetoran pajak melalui metode menaati ketentuan resmi pajak yakni dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

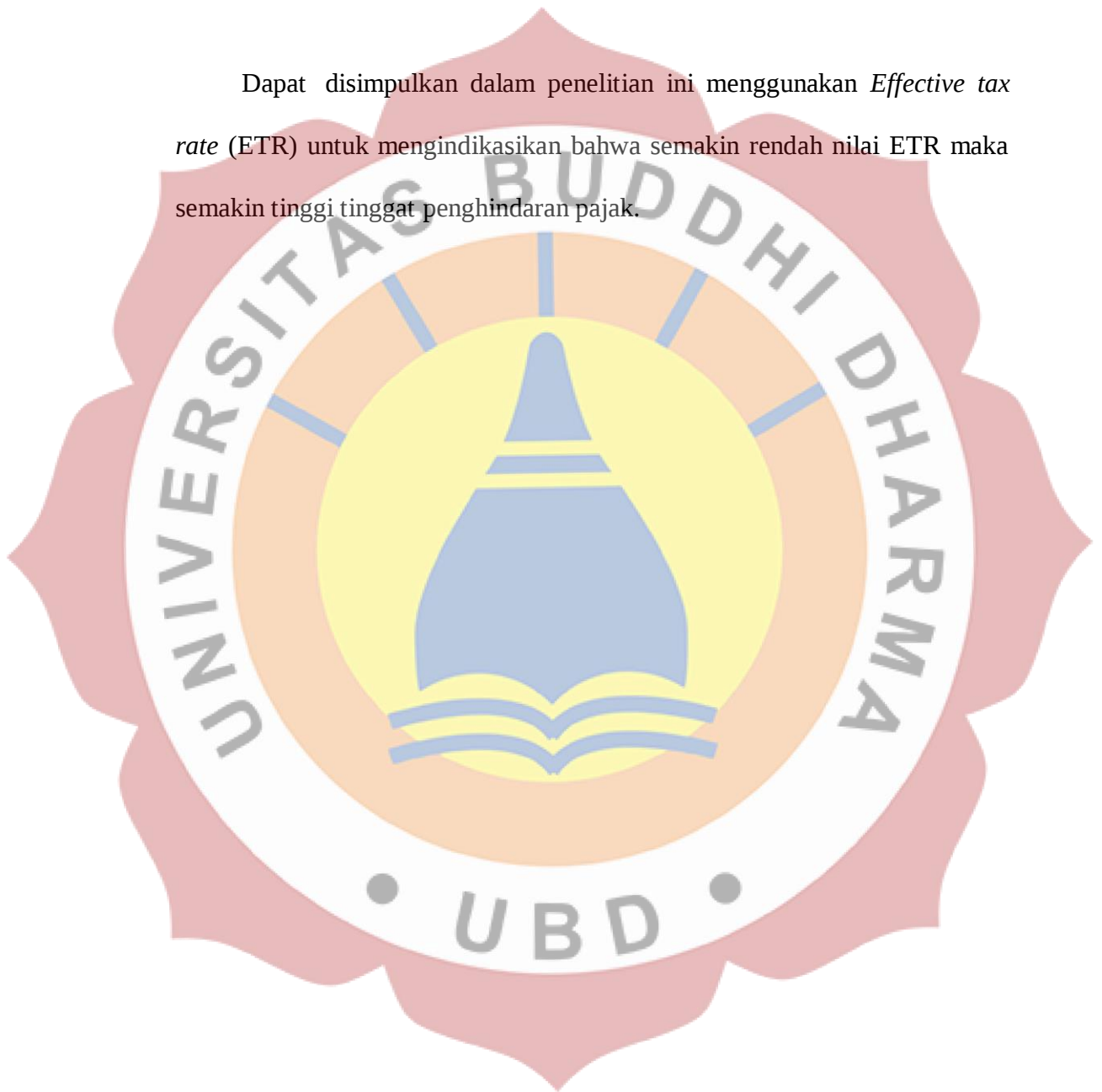
Tax Avoidance adalah suatu cara guna meminimalisasi tagihan pajak melalui pemanfaatan celah maupun menggunakan interpretasi yang tidak diharapkan dari etika pajak (Ann, 2019)

dengan begitu dapat disimpulkan bahwa metode guna meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan celah pada perundang-undangan pajak, terdapat banyak metode dalam melaksanakan *tax avoidance* yaitu dengan menggunakan rumus *Effective tax rate* (ETR) dan *Cash effective tax rate*

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan *Effective tax rate* (ETR) untuk mengindikasikan bahwa semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.



B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.I

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hidayat, (2018)	Pengaruh profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan Variabel Dependen: penghindaran pajak	-Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. -pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
2.	Pitaloka dan Aryani Merkusyawati, (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite Audit,	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite	-profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - <i>leverage</i> berpengaruh

		dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Audit, dan Karakter Eksekutif Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	terhadap penghindaran pajak -komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3.	Winarto dan Oktaria (2022)	Pengaruh intensitas aset tetap dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek	Variabel Indepenen: intensitas aset tetap dan <i>leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- intensitas aset tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> -leverage berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i>

		indonesia tahun 2016 – 2019		
4.	Sudaryo <i>et al.</i> , (2018)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	variabel independen: <i>profitabilitas</i> , <i>leverage</i> , kualitas audit dan komite audit variabel dependen : <i>tax avoidance</i>	- <i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> -kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Anggraeni dan Susandy (2018)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan	Variabel Independen: Komisaris Independen,	-komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

		Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)	<i>Leverage</i> , profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> -profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6.	Patricia dan Wibowo (2019)	Pengaruh <i>Corporate</i> <i>Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Return On</i> <i>Assets (Roa)</i> Terhadap <i>Tax</i>	Variabel Independen: <i>Corporate</i> <i>Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Return On Assets</i> (Roa)	- <i>Corporate</i> <i>Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> -Ukuran perusahaan berpengaruh secara

		<i>Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2018	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> -return on assets berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Karunia et al., (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i>, <i>Profitabilitas</i>, Capital Intensity, Dan	Variabel Independen: <i>Leverage</i>, <i>Profitabilitas</i>, Capital Intensity,	-<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - <i>Profitabilitas</i> tidak

		Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015- 2018)	Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>tax avoidance</i>	berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
8.	Margaretha dan Jenni (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> Dan <i>Leverage</i>	Variabel independen: Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> Dan	-Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

		Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)	<i>Leverage</i> Variabel Dependen : <i>tax avoidance</i>	- <i>Sales</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	Theresia dan Jenni (2018)	Pengaruh <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan	Variabel Indpenden: <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Variabel Dependen: nilai	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - Ukuran perusahaan berpenngaruh terhadap nilai perusahaan.

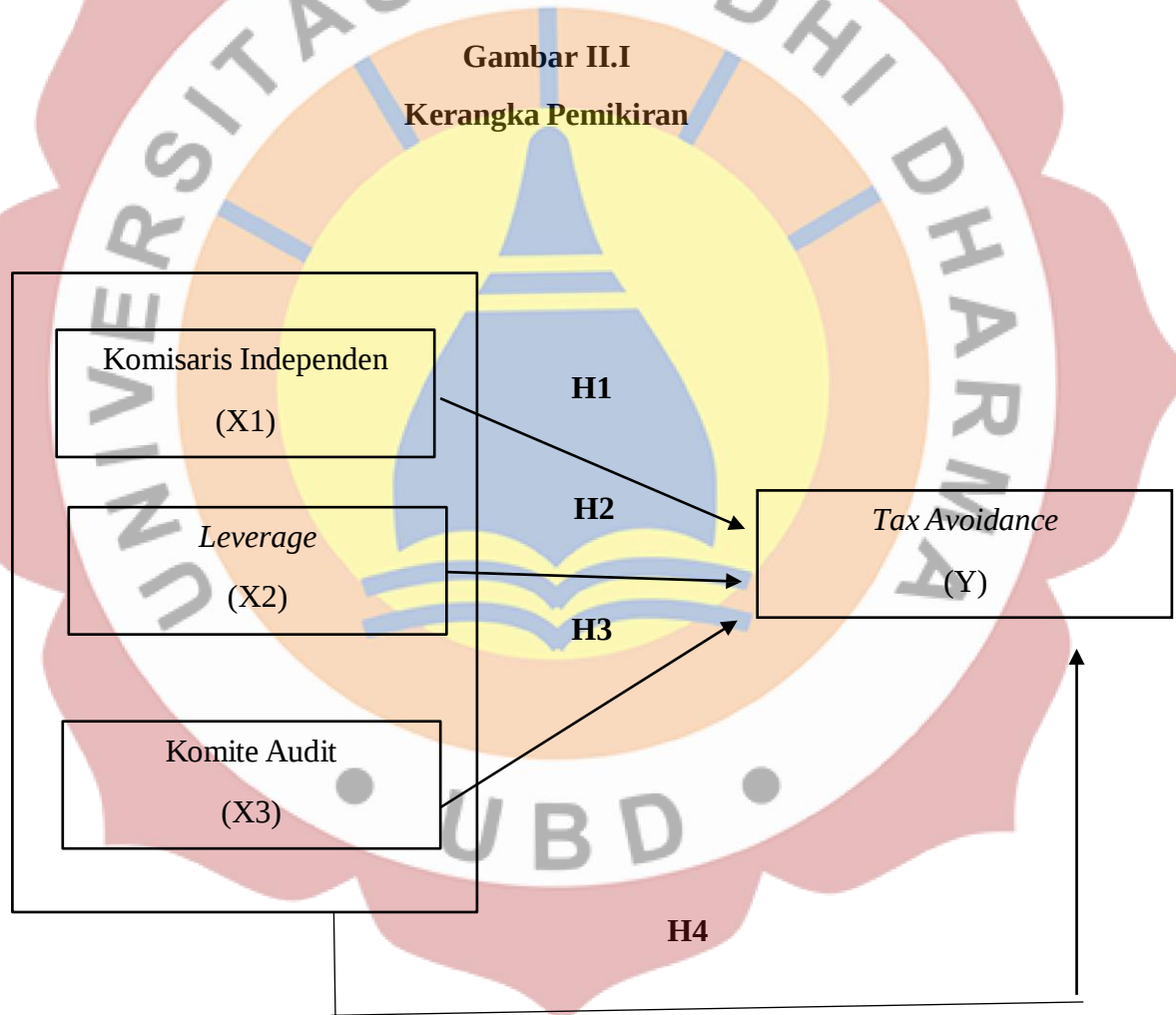
		Manufaktur Sektor <i>Food And Beverage</i> yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017	perusahaan	-Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
10.	Chandra (2022)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas	Variabel Independen : Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas	-komisaris independent berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance - komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

		terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 – 2020)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance - profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
11.	Darma (2021)	Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan</i>	- dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. - leverage berpengaruh terhadap tax

		Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014- 2018)	Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>avoidance</i> -Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i>.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Pada studi ini diilustrasikan tentang dampak Komisaris Independen, *Leverage*, Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor *Industrial Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022). Berikut adalah kerangka pemikiran pada studi ini bisa dilihat melalui gambar 2.1 :



D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban temporer atas perumusan permasalahan yang bisa dikategorikan bersifat temporer sebab fakta yang diberikan belum tentu benar, hal ini membuat studi perlu dilakukan guna menunjukkan benar atau tidaknya hipotesis yang diberikan. Hipotesis yang di uji pada studi ini adalah pengaruh Komisaris independen, *Leverage*, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (studi empiris di instansi sub sektor *industrial goods* yang terdata dibursa efek indonesia tahun 2018-2022)

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Komisaris independen merupakan komisaris yang ditujukan guna membangun iklim yang adil serta mempertahankan “*Fairness*” serta sanggup menghasilkan stabilitas diantara kepentingan investor secara menyeluruh dengan proteksi akan keperluan investor hingga *stakeholders*. Sebagai indikator independensi dewan, eksistensi komisaris independen bisa menaikkan mutu pengawasan sebab tidak terikat dengan instansi secara leluasa ketika mengambil kebijakan tertentu.

Keberadaan komisaris independen pada sebuah perusahaan bisa menghindari terjadinya tindak penghindaran pajak, dikarenakan komisaris independen mempunyai pertanggungjawaban kepada investor dan dinilai akan mengedepankan kepatuhan instansi terhadap perpajakan yang ditetapkan (Oktavia, 2020). Berdasarkan uraian yang terkait maka Komisaris independen berdampak atas *tax avoidance*, maka hipotesis pada studi ini :

H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Menurut hipotesis serta studi terdahulu, bisa diambil simpulan hipotesis menjadi:

Leverage adalah analisa yang dimanfaatkan dalam pengukuran tahapan sebuah instansi memanfaatkan pembiayaan lewat pinjaman. Perbandingan yang dimanfaatkan pada pengukuran tingkatan solvabilitas suatu instansi yakni dengan pengukuran besaran total aktiva instansi yang didanai dengan jumlah pinjaman. Hasil studi tentang *Leverage* atas *Tax Avoidance* berdasarkan Janrosi (2018) menjelaskan bahwasanya *Leverage* mempunyai dampak yang berarti atas *Tax Avoidance* hal tersebut menjadi bukti bahwasanya besaran utang membuat keuntungan terkena pajak jadi semakin berkurang sebab insentif perpajakan terhadap bunga utang makin

tinggi. Bisa disimpulkan leverage yang makin tinggi akan menurunkan penghindaran pajak yang dilaksanakan sebuah instansi sebab munculnya biaya bunga.

Instansi yang memiliki risiko *leverage* tinggi yang berdampak dari kontrol yang ketat dilaksanakan *debtholder* atas kegiatan sebuah instansi, instansi yang memiliki tingkatan *leverage* tinggi bisa menjadi tergantung dengan hutang eksternal dalam mendanai aktiva yang dimiliki. Berdasarkan uraian yang terkait maka *Leverage* berdampak atas *tax avoidance*, maka hipotesis pada studi ini:

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*

Menurut hipotesis serta studi terdahulu, bisa diambil simpulan hipotesis menjadi:

Eksistensi komite audit dengan efektivitas yang baik pada upaya untuk mencegah tindakan *tax avoidance* yang memiliki arti eksistensi komite audit yang makin tinggi pada sebuah instansi bisa menaikkan mutu *good corporate governance* pada sebuah instansi. Sehingga bisa meminimalisir *tax avoidance*. Hal tersebut selaras dengan studi yang diadakan (Pohan, 2018) yang menjelaskan bahwasanya komite audit mempunyai tugas melaksanakan kontrol pada pembuatan pelaporan finansial instansi

sehingga bisa meminimalisir kecurangan dari pihak pengelola, instansi yang mempunyai komite audit akan mempunyai tanggung jawab serta keterbukaan untuk memberikan pelaporan finansial perusahaan sebab komite audit akan melakukan monitor semua aktivitas yang berjalan pada perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak total komite audit di sebuah instansi maka kecondongan pihak pengelola untuk melaksanakan tindakan *tax avoidance* akan makin berkurang. Praktik *tax avoidance* jadi lebih sukar dilaksanakan sebab komite audit lebih tegas serta ketat ketika menjalankan tanggung jawabnya. sehingga dapat dirumuskan hipotesis studi ini menjadi:

H₃: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh Komisaris independen, Leverage, Komite audit terhadap *tax avoidance*

Menurut hipotesis serta studi terdahulu, bisa diambil simpulan hipotesis menjadi:

Komisaris independen menjadi penengah antara pihak agent dan pihak principal pada penentuan kebijakan sebuah perusahaan, sehingga tidak melanggar hukum dalam menentukan prinsip-prinsip terkait pembayaran pajak, komisaris independen dan komite audit adalah unsur dari manajemen perusahaan, mempunyai konsep transparansi dalam

pengungkapan dan pengukuran untuk mengurangi manajemen dalam tindakan kecurangan terhadap *tax avoidance* maupun manipulasi laba oleh manajemen.

Leverage memiliki arti makin besar tingkatan pinjaman sebuah instansi maka pajak yang disetorkan oleh instansi makin besar dan nilai pinjaman yang instansi terkait miliki makin besar dan membuat tingkat *tax avoidance* semakin tinggi pula. Namun sebaliknya jika semakin kecil pajak yang disetorkan oleh instansi bermakna nilai hutang yang dimiliki perusahaan makin rendah sehingga ada 2 kemungkinan perusahaan tidak memiliki hutang atau perusahaan itu berada diambang kebangkrutan.

Komite audit melakukan perannya dalam membantu komisaris independen agar informasi yang diberikan dalam mengambil keputusan secara tepat dan memberikan pertimbangan kepada manajemen dalam pengendalian internal dan juga menghindari kecurangan dalam laporan keuangan. Komite audit memiliki tugas dalam menelaah laporan keuangan, memantau aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dalam perusahaan dan memastikan kepatuhan perusahaan dalam kebijakan yang dibuat.

H₄: Komisaris independen, *Leverage*, Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tabel III.I

Jenis Penggolongan Penelitian

No	Jenis Penggolongan	Macam Penelitian
1	Menurut Pendekatan	Penelitian kuantitatif, memakai informasi berwujud angka yang terukur pada satuan numerik serta didapatkan dari pelaporan finansial serta pelaporan per tahun instansi yang merupakan objek pengamatan
2	Menurut Tempat	Penelitian perpustakaan, karena studi yang dimanfaatkan untuk memperoleh data serta informasi dari bermacam sumber yang terdapat di perpustakaan termasuk jurnal, artikel, serta buku.
3.	Menurut Bidang Ilmu	Bidang Ilmu Bisnis, karena merupakan proses untuk menemukan penyelesaian dari suatu masalah bisnis yang ditemukan melalui proses pencarian analisis yang menyeluruh terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya masalah bisnis.

B. Objek Penelitian

Pada studi ini, yang merupakan objek dalam studi ini yakni pelaporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sub sektor *industrial goods* yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2018-2022. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap ETR (*tax avoidance*) mencakup 3 variabel bebas yakni komisaris independen (KI), *leverage* (DAR), komite audit (KA). Untuk pengumpulan laporan tahunan dan laporan keuangan diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

C. Jenis dan Sumber Data

Tipe data yang dimanfaatkan pada studi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari media perantara atau didapatkan secara tidak langsung dari suatu sumber, informasi sekunder bisa didapatkan dari bermacam sumber termasuk buku, laporan, dan perantara lainnya. Data-data pada studi ini didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id pada perusahaan sub sektor *industrial goods* yang terdata pada Bursa Efek Indonesia.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas tertentu. Dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor *industrial goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sub sektor *industrial goods*.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan pada sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan sub sektor *industrial goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
2. Perusahaan sub sektor *industrial goods* yang tidak memiliki data mengenai komisisaris independen, *leverage*, komite audit periode 2018-2022

3. Perusahaan sub sektor *industrial goods* yang tidak menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunan menggunakan mata uang Rp (Rupiah) periode 2018-2022
4. Perusahaan sub sektor *industrial goods* yang laporan keuangannya tidak ditemukan diwebsite www.idx.co.id selama periode 2018-2022.
5. Perusahaan sub sektor *industrial goods* yang mengalami kerugian selama periode 2018-2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pusaka dan dokumentasi, yaitu dimana studi pusaka digunakan dengan membaca buku dan jurnal, mengolah data dan melalui internet sebagai acuan, sedangkan dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dengan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan variabel yang diteliti seperti laporan keuangan, laporan tahunan yang dipublikasikan di BEI.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel bebas adalah variabel yang mendominasi yang menyebabkan suatu perubahan terhadap variabel dependen (terikat). Adapun yang termasuk variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah :

a. Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keberadaan komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan secara bebas. Jumlah dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Kehadiran dewan komisaris independen diharapkan tidak hanya sekedar menjadi simbol atau hiasan bahkan ada yang menyebutkan sebagai *shock therapy* bagi orang yang bermaksud tidak bagi perusahaan karena jika tidak berfungsinya komisaris independen akan membuat peluang perusahaan melakukan kecurangan yang dimana kehadiran komisaris independen sangat penting bagi terciptanya perusahaan yang baik. Dalam penelitian ini untuk mengitung komisaris independen menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Semua Anggota Dewan komisaris}}$$

Sumber : (Citra Jatiningrum, 2021)

b. Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva, dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya. Dalam praktiknya apabila dari hasil perhitungan ternyata perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi akan berdampak timbulnya resiko kerugian yang lebih besar, tetapi ada juga kesempatan mendapatkan laba. Namun sebaliknya jika perusahaan memiliki rasio *leverage* lebih rendah tentu mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil terutama pada saat perekonomian menurun karena akan berdampak pada rendahnya tingkat hasil pengembalian (return). Dalam penelitian ini untuk menghitung *leverage* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : (Ely Siswanto, 2021)

c. Komite audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris independen dan beranggotakan sekurang kurangnya 3 orang dan tugas dari komite audit dalam menelaah laporan keuangan, memantau aktivitas pelaksanaan manajemen resiko dan pengendalian internal oleh direksi mengidentifikasi benturan kepentingan, dan lain-lain yang efeknya secara langsung dapat meminimalisir adanya praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian ini untuk menghitung komite audit menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Sumber : (Rizal Mawardi & Laela Lanjarsih, 2019)

2. Variabel Dependen

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu : variabel dependen dan variabel independen.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketentuan perpajakan suatu negara. Pada dasarnya penghindaran pajak bersifat sah dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Variabel penghindaran pajak ini sebagai variabel terikat.

Dalam penelitian ini penghindaran pajak akan diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Artinya semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Namun sebaliknya semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah penghindaran pajaknya. Dalam penelitian ini menggunakan rumus ETR sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Rakhmanita, 2022)

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh tiap variabel independen dan dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan program SPSS versi 25 Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskripsi adalah sebuah data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, varian minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, *skewness* atau kemenangan distribusi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji dalam sebuah model regresi apakah variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Silaswara et al., 2018) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Julian & Suhendra, 2023) dan (Kiki & Marsella Yudhita, 2023)

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai profitabilitas $> 0,05$ maka hipotesis diterima karena data terdistribusi secara normal.
2. Apabila nilai signifikan atau nilai profitabilitas $< 0,05$ maka hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji korelasi antar variabel independen pada suatu model regresi. Deteksi multikolineritas pada suatu model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *varianceinflationfactor* (VIF) (Silaswara et al., 2018) Jika variabel independen berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel

bebasnya sebesar atau sama dengan 0, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas pada regresi yaitu :

1. jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolineritas.
2. jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolineritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu model uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan pada pengamatan yang lain (Silaswara et al., 2018). Dalam hasil regresi dengan menggunakan korelasi spearman, dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk melihat dari angka probabilitas dengan ketentuan yaitu:

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis ditolak karena data ada heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Silaswara et al., 2018). Autokorelasi bisa terjadi pada data *time series* namun jarang terjadi, pada data yang sampelnya *crossection* karena variabel pengganggu yang satu berbeda dengan yang lain. Adapun mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai durbin watson dengan kriteria :

1. Angka D-W kurang -2 berarti ada autokorelasi positif
 2. Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
 3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif
3. Uji Regresi Berganda
- a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih *independentvariable* terhadap *dependentvariable*. (Silaswara et al., 2018). Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara Komisaris Independen, *Leverage*, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Model dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = *Effective Tax Rate*

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi untuk setiap variabel x

X_1 = Komisaris Independen

X_2 = *Leverage*

X_3 = Komite Audit

e = Standar Error

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R^2 , yang digunakan untuk memperkirakan sejauh apa model mampu menerangkan variabel independen. Koefisien determinasi mempunyai angka diantara 0 juga 1. Skor yang mendekati 1 memperlihatkan bahwasanya variabel bebas mencakup seluruh pengetahuan yang dibutuhkan guna memperkirakan variabel terikat. Pengaruh terhadap variabel dependen berkorelasi lebih kuat dengan nilai R^2 variabel independen (Julian & Suhendra, 2023). Namun menurut (Kiki & Marsella Yudhita, 2023) Nilai adjusted R^2 merupakan penentuan hasil uji koefisien determinasi. Nilai adjusted R^2 yaitu 0 sampai 1 jika nilai adjusted R^2

mendekati 1, berarti bahwa hampir semua informasi yang dibutuhkan dari variabel bebas disediakan untuk memberikan variasi variabel terikat.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang dimana untuk mengetahui sejauh mana pengaruh komisaris independen, *leverage*, komite audit sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Untuk menguji hipotesis pengaruh komisaris independen, *leverage*, komite audit secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t

a. Uji t

Pengujian ini dilakukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. (Kiki & Marsella Yudhita, 2023) namun menurut (Julian & Suhendra, 2023) Pengujian T menunjukkan signifikansi atas dampak dependen secara parsial bagi variabel terikat melalui perbandingan t-hitung dan t-tabel terhadap signifikansi 0,05.

Berikut pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan, sebagai berikut:

1. Jika nilai sig. $< 0,05$, maka H_a ditolak
5. Jika nilai sig. $> 0,05$, maka H_a ditolak

b. Uji F

uji statistik F digunakan untuk memastikan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, karena dalam penelitian ini digunakan uji F untuk membentuk hipotesis (Kiki & Marsella Yudhita, 2023) namun hal ini sejalan dengan (Avraini & Suhendra, 2023) yang mengatakan dikatakan bahwa variabel berpengaruh signifikan apabila nilai sig < 0.05 .

Berikut dasar pengambilan keputusan, nilai F hitung dengan nilai F tabel sebagai berikut.

1. Apabila F hitung $< F$ tabel, maka H_4 ditolak.
2. Apabila F hitung $> F$ tabel, maka H_4 diterima.